

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Banten pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 1,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada triwulan II 2020 yang mencapai 1,16% (yoy). Angka inflasi tersebut lebih rendah dibanding historis 3 tahun terakhir yaitu sebesar 2,62 % (yoy) serta realisasi inflasi nasional dan regional Jawa yang masing - masing sebesar 1,60% (yoy) dan 1,47% (yoy). Secara spasial, pada triwulan III 2021 meningkatnya inflasi tahunan Banten terutama didorong oleh kenaikan harga yang terjadi di Kota Tangerang, Disisi lain inflasi Kota Cilegon melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2021, peningkatan tekanan harga yang terjadi pada 8 dari sebelas kelompok pengeluaran memberikan andil pada kenaikan inflasi tahunan. Dari jumlah tersebut, kelompok makanan , minuman dan tembakau (andil 0,73%), Kelompok perumahan air, listrik dan bahan bakar lainnya (0,19%) dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,15%) menjadi 3 kelompok terbesar yang menyumbang inflasi. Sementara itu, kenaikan laju inflasi tahunan (yoy) terutama terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, penyediaan makanan dan minuman restoran, dan kelompok pakaian dan alas kaki. Berdasarkan andil tersebut, secara tahunan kelompok makanan, minuman dan tembakau masih memberikan andil yang tertinggi diantara 11 Kelompok pengeluaran dan mengalami kenaikan tekanan pada triwulan ke III 2021. Komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil inflasi yang cukup besar pada inflasi Provinsi Banten terutama minyak goreng,. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan baku rumah tangga juga menyumbangkan tekanan inflasi pada komoditas sewa rumah, selanjutnya kelompok penyediaan makanan dan minuman/resto pada komoditas nasi dengan lauk. Secara parsial, inflasi Provinsi Banten pada TW III Provinsi Banten 2021 terjadi pada seluruh kota sampel IHK di provinsi Banten, inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilegon sebesar 1,91% (yoy) diikuti oleh kota Serang sebesar 1,70% (yoy) dan kota Tangerang sebesar 0,92% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat 2 kelompok yang secara bersama-sama mendorong kenaikan di 3 kota sampel IHK yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau dan perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, Sementara itu terdapat 4 Kelompok pengeluaran yang secara bersama-sama menahan tekanan inflasi secara terbatas yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok pendidikan dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya..

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi di Provinsi Banten pada triwulan III 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,40%, meningkatnya inflasi tahunan Banten ini didorong oleh kenaikan harga yang terjadi di Kota Tangerang; Dari segi bahan pokok terjadi kelangkaan minyak goreng yang cukup tinggi, sehingga terjadi kenaikan harga hingga 100% serta sulitnya mendapatkan minyak goreng dipasaran. Kenaikan tekanan inflasi minyak goreng dipengaruhi masih tingginya permintaan CPO (Crude Palm Oil) global dan mengikuti tren harga minyak bumi yang naik; Mengintensifkan pemantauan pergerakan harga kebutuhan bahan pangan strategis secara harian.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Penjajakan kerjasama baik intra maupun antardaerah, guna memenuhi memastikan kelancaran distribusi bahan pokok; Perlu adanya langkah antisipasi dalam rangka persiapan perekonomian khususnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok minyak goreng, daging ayam

ras, rokok kretek filter, tahu mentah dan jeruk diprovinsi Banten; Melakukan beberapa program koordinasi dalam rangka menjaga kestabilan inflasi yang mengacu pada 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif; Mengoptimalkan pusat layanan usaha terpadu yang bertujuan sebagai pusat layanan konsultasi bisnis, pusat promosi produk usaha dan sebagai tempat berkembangnya usaha.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Perlu upaya penguatan koordinasi antara TPID Provinsi Banten dengan TPID Kabupaten/Kota dalam rangka penyediaan dan pendistribusian barang komoditas yang produksinya terbatas atau berada di Provinsi Banten; Rencana pembangunan Pusat Distribusi Provinsi Banten guna memperpendek rantai distribusi komoditas strategis; Mengupayakan inovasi guna meminimalisir ketergantungan bahan makanan pada daerah lain, melakukan penguatan ketahanan pangan di Provinsi Banten, melakukan penganekaragaman pangan dan memantau keamanan pangan; Perlunya inovasi penjualan komoditi secara online; Menginisiasi kerjasama antar kabupaten/kota se-Provinsi Banten dengan memanfaatkan potensi produksi yang ada dengan melakukan pendataan ketersediaan pasokan daerah yang surplus dan defisit; Perlunya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Memastikan ketersediaan bahan pokok untuk secara terpadu memenuhi kebutuhan; Melakukan survey harga dan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Provinsi Banten agar harga barang tetap terkendali; Rencana pembangunan rice milling unit sebagai pusat tempat penggilingan padi termasuk tempat pengeringan, usaha pemotongan ayam, dan sebagainya.; Memantau dan menjaga ketersediaan stock pangan di Provinsi Banten apabila ada indikasi terkait kenaikan komoditi; Memantau dan mengendalikan harga beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah di pasaran bekerjasama dengan Sub Divre Bulog di wilayah Provinsi Banten; Seluruh Anggota TPID agar tetap melakukan upaya terbaik dalam pengendalian inflasi di Provinsi Banten; Konsep Kerjasama antar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten agar mendapat dukungan dari Kepala Daerah di wilayah masing-masing sehingga segera terwujud kerjasama dimaksud; Sidak terkait harga komoditi bahan pokok dipasaran.